

# **PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SD NEGERI BANYU URIP VIII SURABAYA**

**Ella Febya Ardani  
Syunu Trihantoyo**

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya  
ellaardani16010714047@mhs.unesa.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini telah dilakukan karena peneliti ingin menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS yang didukung oleh media sebagai alat informasi kepada masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya transparansi dan akuntabilitas pada partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi partisipan pasif, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Sedangkan, untuk analisis data dilakukan dengan cara kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data. Guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan juga konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah tidak terkecuali komite sekolah selaku perwakilan dari masyarakat pada setiap pengelolaan dana BOS dan juga adanya mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang menggunakan dana BOS sebagai sumber keuangan sekolah kepada masyarakat hal tersebut memanfaatkan Media yang digunakan oleh sekolah sebagai alat penginformasian data keuangan sekolah yang berupa media Online dan Media Offline, serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat sebagai dampak dari adanya transparansi dan akuntabilitas.

**Kata kunci :** *transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat.*

## **Abstract**

This research was conducted because the researcher wanted to analyze the application of transparency and accountability of BOS funds supported by the media as a means of information to the public, as well as the impact arising from the existence of transparency and accountability on community participation. This study uses a descriptive qualitative method with a case study research design. Data collection techniques used were passive participant observation, interviews, and also study documentation. Meanwhile, data analysis is done by data condensation, data presentation, and data verification. In order to test the validity of the data the researcher uses credibility, dependability, transferability, and confirmability. The results of this study found that the application of transparency and accountability carried out by involving all components of the school was no exception the school committee as a representative of the community in each management of BOS funds and also held accountable for all activities that use BOS funds as a source of school finance to the community. used by schools as a means of informing school financial data in the form of Online and Offline Media, as well as increasing community awareness and participation as a result of transparency and accountability.

**Keywords:** *transparency, accountability, community participation*

## PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang sangat parsial dalam dunia pendidikan. Ditambah dengan banyaknya isu-isu yang terus bergulir seiring terjadinya perubahan dalam pendidikan terlebih dalam proses pendidikan di sekolah. Namun banyak pula upaya yang ditempuh oleh pemerintah sebagai pemimpin lembaga pendidikan untuk menjawab semua isu-isu dan masalah yang muncul dalam pendidikan, salah satunya dengan memberdayakan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dapat secara langsung berinteraksi dengan peserta didik. Pemberdayaan sekolah ini dikemas oleh pemerintah melalui program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mulyasa (2004) menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah suatu alternatif yang diambil sekolah dalam rangka pelaksanaan program desentralisasi oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan. Program ini menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif bagi semua peserta didik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan program yang memandang bahwa partisipasi masyarakat adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat menjadi pendorong bagi pelaksanaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien yang dilakukan sekolah secara mandiri. Adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sendiri juga merupakan kesempatan bagi sekolah untuk meningkatkan performa kinerja bagi para personil. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini juga menawarkan keterlibatan yang aktif dari *stakeholder* pendidikan yang ada di sekolah, keterlibatan tersebut berupa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Membahas mengenai partisipasi juga diutarakan oleh Krina (2003) yang menyebut bahwa partisipasi ialah sebuah prinsip dimana semua orang memiliki hak untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sampai saat ini masih melewati jalan panjang dan berliku-liku, banyak pula masalah serta isu-isu yang membuat proses penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini menjadi semakin rumit. Salah satu masalah

yang akhir-akhir ini semakin menjadi sorotan dalam pendidikan adalah masalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yakni keterbukaan yang diberikan oleh sekolah kepada publik yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari sekolah kepada masyarakat. Sulasminten, *et.al* (2016) menyatakan bahwa dalam perspektif MBS, terdapat pilar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang nantinya pada pelaksanaan suatu kegiatan terdapat peran aktif dan partisipasi masyarakat yang mampu menyumbang kesuksesan dalam terlaksanakannya program sekolah. Hal serupa juga disampaikan oleh Minarti (Ekowati: 2016) yang menjelaskan tentang transparansi bahwa, "Transparansi dalam Manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu proses keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya". Sedangkan pendapat Hernandez (2008) yang mendefinisikan teori *stewardship* atau teori akuntabilitas sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang suatu kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang, yang artinya akuntabilitas adalah prinsip yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi karena tujuannya untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut. Bagi sekolah akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dan bermanfaat, dokumen dari akuntabilitas terutama akuntabilitas kinerja sekolah dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan rencana program pengembangan sekolah selanjutnya (Trihantoyo: 2015). Selain itu akuntabilitas yang baik akan secara mudah membawa transparansi kegiatan atau program sekolah berjalan sesuai aturan. Berbicara mengenai transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam operasional sekolah, Hal ini dapat terlihat bahwa sebagian besar wali murid memilih sekolah untuk peserta didik dikarenakan tingkat transparansi dan akuntabilitas sekolah tersebut, yang mana bentuk transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh sekolah tidak hanya pada bidang pengajaran melainkan juga

pada bidang keuangan. Trihantoyo (2015) juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki peran yang penting dalam perencanaan membangun strategi dalam suatu organisasi terutama dalam pendidikan. Fenomena ini dapat terjadi salah satunya karena pemikiran masyarakat yang menilai bahwa biaya pendidikan yang sangat mahal dan dibayar oleh pemerintah melalui BOS Nasional dan BOS Daerah guna pelayanan pendidikan anak mereka, sehingga membuat masyarakat berfikir, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Selaras dengan Langkah-Langkah pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilengkapi tujuh komponen dengan tujuan agar dapat dikelola secara maksimal. Menurut Nurkholis (2003) Komponen tersebut antara lain : Kurikulum, Kesiswaan, Keuangan, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan hubungan masyarakat, Layanan khusus lembaga pendidikan. salah satu komponen tersebut juga menyebutkan bahwa keuangan merupakan komponen yang dapat mendukung berjalannya MBS dengan efektif. Menyangkut masalah keuangan atau pembiayaan sekolah yang sangat krusial dan terhubung kepada sistem manajemen keuangan sekolah, hal tersebut diutarakan beberapa ahli mengemukakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses kerja sama yang dibangun antara individu dan juga kelompok yang mengikutsertakan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan organisasi sebagai aktivitas manajemen, Syafaruddin (2005). Sedangkan untuk keuangan diartikan oleh Lawrence J. Gitman (Wahidah:2016) yang diambil dari bukunya dengan judul *Principles of Managerial Finance* menyebutkan bahwa "*Finance can be defined as the art and science of managing money*" yang disimpulkan bahwa keuangan dalam pengelolaannya dapat diartikan sebagai sebuah seni dan ilmu pengetahuan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan ialah serangkaian usaha yang dilakukan dengan tujuan mencapai pendidikan yang telah dirancang dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran tersebut berasal dari Dana Bantuan Operasional sekolah atau BOS yang mana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada awalnya adalah suatu bentuk dari kompensasi

kenaikan bahan bakar minyak, yang pada akhirnya pada tahun 2005 dikeluarkanlah dana sebesar 6,2 triliun yang dibagikan kepada hampir seluruh sekolah di Indonesia.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan salah satunya dapat didorong secara langsung dengan sumber daya keuangan dan pembiayaan pendidikan. dalam pengelolaan keuangan memerlukan komponen yang diatur dengan sebaik-baiknya. Menurut Mulyasa (2006) Dana BOS dikelola melalui beberapa kegiatan antara lain perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Namun pengelolaan keuangan dana BOS tidak menutup kemungkinan masih mendapatkan masalah dalam keefektifan dalam menjalankan sistem pengelolaan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS, penganggaran, dan perencanaan dana BOS.

Data di lapangan yang ditemukan oleh peneliti mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekolah menunjukkan bahwa SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya telah melaksanakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan media baik *Online* maupun *Offline* yang telah digunakan sebagai sarana pelaporan hasil kinerja khususnya bidang keuangan berupa pengelolaan dana BOS. Dari data yang ditemukan oleh peneliti, bentuk transparansi yang dilakukan sekolah dapat dilihat dari adanya keterlibatan komite sekolah, staf guru selain komponen penting seperti halnya kepala sekolah, bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Selain itu juga ada media papan pengumuman yang menjelaskan keluar masuknya dana yang telah digunakan sekolah untuk operasional sekolah. Tidak hanya itu, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh sekolah dilakukan dengan adanya pelaporan rekapitulasi penggunaan dana BOS. Proses pelaporan tersebut dilakukan oleh sekolah dengan memanfaatkan momen penting seperti perkumpulan walimurid ataupun rapat pengambilan raport dan rapat-rapat lainnya. Tujuan daripada adanya transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan untuk menarik simpati dari masyarakat, simpati tersebut berupa

partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Tujuan tersebut juga disampaikan oleh Suzuki (2012) yang menyebutkan bahwa tujuan akuntabilitas ialah pertanggungjawaban keuangan untuk menarik partisipasi orang tua peserta didik. Dan Andrianto (2007) dalam salah satu manfaatnya menyebutkan bahwa transparansi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja lembaga.

Transparansi berarti keterbukaan, keterbukaan ini yang dilakukan oleh sekolah dengan cara mengikutsertakan komite sekolah selaku komponen eksternal sekolah dalam setiap penyusunan RKAS sekolah. Pihak komite sekolah bukan hanya sebagai pihak yang mengawasi melainkan pihak yang ikut menyumbangkan ide-ide dan gagasan baru terhadap setiap program sekolah. Transparansi ini didukung dengan adanya akuntabilitas yang dilakukan sekolah dalam hal pelaporan kepada masyarakat. Data lain yang ditemukan oleh peneliti ialah berupa kendala yang harus dihadapi oleh sekolah seperti halnya keterlambatan pencairan BOS menjadi salah satu hambatan yang ditemui oleh setiap sekolah. Keterlambatan ini sebenarnya sudah dinyatakan dalam Petunjuk Teknis BOS yang mana dana BOS akan dicairkan pada periode Triwulan dengan ketentuan pada bulan terakhir periode tersebut. Seperti contoh, periode triwulan I yakni bulan Januari hingga Maret, maka Dana BOS akan dicairkan pada bulan akhir yaitu bulan maret. Hal ini lantas menjadi hambatan sekolah, seperti diketahui bahwa belanja pegawai tidak tetap harus dibayarkan setiap bulannya sedangkan dana BOS tersebut dicairkan pada bulan terakhir periode Triwulan. Hasil wawancara singkat peneliti dengan Kepala Sekolah SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya menjelaskan bahwa strategi yang digunakan sekolah dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan membuat Skala Prioritas yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana sekolah dipercaya mengatur pengelolaannya sendiri. Skala Prioritas tersebut digunakan oleh sekolah dalam menentukan tingkat urgensi dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

## METODE

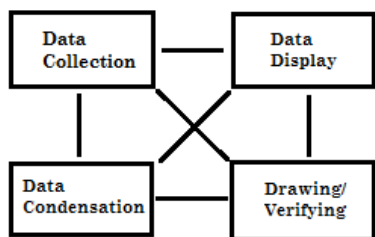
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menurut Arikunto (2010) bahwa deskriptif penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam suatu sebuah situasi, lapangan, atau wilayah tertentu. Pendekatan Kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengkaji dan mendeskripsikan fenomena atau peristiwa, orang, objek, ataupun proses yang terkait dengan Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana BOS guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya. Penelitian kualitatif ini ditujukan guna menganalisis fenomena-fenomena sosial yang berasal dari sudut pandang atau perspektif partisipan. Sedangkan partisipan sendiri ialah orang-orang yang memiliki informasi mengenai topik dibahas oleh penulis, orang-orang inilah yang akan diwawancarai, diobservasi, dan memberikan data serta memberikan pemikiran dan persepsinya.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mana menurut Manab (2015), studi kasus adalah Eksplorasi yang dilakukan dari sistem terikat yang diangkat dari sebuah kasus dari waktu ke waktu dengan pengumpulan data yang mendalam dan mendetail dengan melibatkan sumber-sumber informasi yang maksimal dengan konteks yang menyeluruh. Karakteristik studi kasus yang diungkapkan oleh Gunawan (2013) bahwa penelitian dengan model studi kasus sangat tepat jika digunakan dalam penelitian yang sifatnya *eksplanatori* yang mana penelitian yang bertujuan untuk menggali penjelasan dari kausalitas, atau sebab akibat yang dikandung dalam suatu objek yang sedang diteliti.

*Human instrumental* sebagai kehadiran peneliti dalam suatu proses penelitian dianggap sebagai instrumen yang mutlak dalam penelitian. Moleong (2006:9) menyatakan pada waktu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, peneliti ikut berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Dalam hal ini sumber data penelitian berdasarkan subjek yang secara langsung terkena dampak dari adanya

penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS, yakni kepala sekolah, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Komite Sekolah, Bendahara, Masyarakat, dll.

Proses selanjutnya ialah analisis data, Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa proses analisis data dilakukan secara simultan yang mana peneliti harus mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat dari lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Miles, dkk (2014) analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data model Miles dan Huberman (Afrizal: 2015) yang menjelaskan bahwa teknis ini meliputi: (1) kondensasi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi.



Bagan 1. 1 Model Analisis Data Miles dan Huberman  
Sumber : Miles, dkk (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS guna meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya**

Hasil temuan penelitian di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya terkait dengan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS yaitu dimana pelaksanaannya dilakukan pada saat tahap penyusunan atau proses perencanaan dana BOS. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2020 yang membahas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang mana menjelaskan pada pasal 3 ayat (5) yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS dan dapat mengkoordinir semua aspirasi dari

pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini dimaksudkan supaya bahwa setiap pengelolaan yang dilakukan sekolah dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat berjalan seacara terbuka, baik terbuka dalam mekanisme dan terbuka dalam menerima setiap aspirasi dan masukan dari para masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan di sekolah.

Penerapan transparansi yang terjadi di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya dilaksanakan pada saat penyusunan dana BOS. Dana BOS yang diterima oleh sekolah meliputi banyaknya siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Mekanisme penerapan transparansi dilakukan dengan sekolah menyiapkan data kebutuhan operasional yang harus dipenuhi oleh sekolah selama satu tahun ajaran, data tersebut sudah mencakup semua kebutuhan baik sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, penggajian guru tidak tetap, dan pembiayaan lainnya. Perencanaan tersebut disusun sehingga membentuk sebuah rencana kegiatan yang bisa disebut Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Seperti yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu Ekowati (2016:77) bahwa RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja yang harus dikeluarkan oleh sekolah guna kepentingan operasional selama satu tahun.

Transparansi yang dilakukan di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya, diungsikan sebagai salah satu upaya agar masyarakat paham bagaimana sekolah mengelola pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan kebutuhan sekolah. RKAS menjadi salah satu perencanaan guna melihat apa saja kepentingan yang bersifat mendesak yang dimiliki sekolah. RKAS di buat dengan berpedoman dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Menurut penuturan dari kepala sekolah SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya yang menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan sekolah sudah ada dalam EDS yang dibentuk sebuah kurva kebutuhan dan kepentingan sekolah yang mana dari kurva tersebut sekolah dapat memutuskan kebutuhan sekolah yang mendesak. Hal tersebut didukung penjelasan dari Laila (2018: 89) yang juga mengatakan bahwa perencanaan Anggaran dan kegiatan yang dibuat oleh sekolah digunakan untuk kegiatan dan

program yang berkaitan dengan siswa serta operasional sekolah. Adapun bentuk RKAS yang di keluarkan oleh SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya, dapat dilihat pada tabel diringkasan di bawah ini :

**Tabel 1** Bentuk Ringkasan Keseluruhan RKAS

NO.	Kegiatan / Program	Nilai RKAS
1.	Pengembangan Perpustakaan	90.586.640
2.	Penerimaan Peserta Didik Baru	1.262.000
3.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	28.967.200
4.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	15.056.880
5.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pembagian Manajemen Sekolah	1.156.000
6.	Pembayaran Honor	144.192.842
7.	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	9.643.580
8.	Pengelolaan Sekolah	55.199.748
9.	Layanan Daya dan Jasa	49.828.464

(Sumber Laporan RKAS Th 2019, Sumber dana BOS)

Ringkasan diatas menunjukkan bahwa dana BOS yang dikelola oleh sekolah telah mencakup semua standar nasional pendidikan. Dari perencanaan tersebut, sekolah akan membagi ke dalam beberapa periode triwulanan yang mana menyesuaikan dengan periode pencairan dana BOS sendiri. Rekapitulasi penggunaan dana BOS di setiap periode triwulanan tersebut dapat diamati dalam tabel dibawah ini yang merupakan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS pada triwulan ke IV tahun 2019 .

**Tabel 1** Rekapitulasi Realisasi Dana BOS periode IV th. 2019

No.	Program/ Kegiatan	Penggunaan Dana
1.	Standar Penilaian Pendidikan	-
2.	Standar Isi	-
3.	Standar Kompetensi Lulusan	17.106.275
4.	Standar Pembiayaan	40.545.526

5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.800.000
6.	Standar Proses	24.064.200
7.	Standar Sarana dan Prasarana	2.306.000
8.	Standar Pengelolaan	-
	Total Pengeluaran Dana BOS	112.822.001

(Sumber Laporan Rekapitulasi Penggunaan dana BOS triwulan IV 2019, Sumber dana BOS)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran daripada dana BOS yang digunakan oleh sekolah pada periode triwulan ke IV sudah mencakup beberapa standar nasional pendidikan. Pengeluaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi seperti halnya standar pembiayaan yang meliputi pengelolaan sekolah dan langganan daya maupun jasa, diikuti dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berupa pembiayaan gaji guru. Selanjutnya ada standar proses yang meliputi pengembangan perpustakaan dan mencakup buku pengetahuan maupun buku induk siswa selama pembelajaran, tidak kalah pentingnya ada standar kompetensi lulusan yang mana sekolah juga menyiapkan lulusan terbaik sehingga mampu meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih baik lagi, standar ini meliputi kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh semua siswa untuk melatih bakat dan minat peserta didik. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, pastinya didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mana juga dianggarkan sekolah dengan rekapitulasi penggunaan pada periode ke IV seperti pada tabel diatas, hal tersebut meliputi pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran.

Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi pada tahap perencanaan keuangan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat yang di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya diterapkan dengan baik. Dana yang diterima oleh sekolah digunakan sesuai kebutuhan siswa dan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dalam proses pengelolaan keuangan sekolah khususnya dana

BOS merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi keuangan.

### **Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS guna meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya**

Biaya pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang dialokasikan pada setiap satuan lembaga pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada sekolah untuk menunjang jalannya proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS sekolah diwajibkan untuk mengelola sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya dengan mengangkat prinsip akuntabilitas sebaik mungkin kepada masyarakat atau *stakeholder*. Penyusunan perencanaan terhadap dana BOS yang berlangsung di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya dimulai dengan melakukan proses penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Perencanaan yang dibuat oleh sekolah ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah dalam periode satu tahun ajaran. Semua komponen sekolah dilibatkan tidak terkecuali guru dan komite sekolah. Dalam penyusunan sendiri, guru yang dikutsertakan sudah terbagi menjadi beberapa koordinator antara lain, koordinator keuangan, koordinator umum, sarana dan prasarana, kurikulum dan kesiswaan. Koordinator ini yang akan menyampaikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi prioritas utama sekolah, baik dalam bentuk kebutuhan yang harus dibeli maupun yang harus diperbaiki.

Dalam proses penyusunan RKAS bukan hanya kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus diperhatikan, semua komponen sekolah yang tergabung dalam proses penyusunan RKAS juga harus merencanakan kegiatan ataupun program sekolah yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun, dan nantinya program tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain dari tim koordinator guru dan staff

kependidikan juga terdapat peran penting dari kepala sekolah, pejabat pelaksanaan teknik kegiatan (PPTK), bendahara dan komite sekolah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Laila (2018: 72) yang menjelaskan bagaimana peran penting Kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, karena sifatnya sebagai penanggungjawab utama maka kepala sekolah harus mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan.

Berbicara mengenai pelaporan atau akuntabilitas sekolah sebagai penerima dan pengelola dana BOS. Menurut temuan penelitian dan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penerapan transparansi di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan proses pelaporan hasil pengelolaan dana BOS yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang dituju seperti halnya pemerintah, masyarakat. Pelaporan dana BOS sendiri dilakukan melalui dua cara yakni Offline dan Online. Pelaporan secara Offline ditunjukkan dengan sekolah yang bertanggungjawab membagikan data hasil pengelolaan dana BOS kepada masyarakat atau *stakeholder*, pelaporan secara offline ini dilakukan oleh sekolah pada saat pelaksanaan rapat antara masyarakat dengan sekolah. Selain itu, pelaporan secara offline juga ditunjukkan sekolah dengan adanya papan anggaran yang berisi besaran dana yang dikeluarkan oleh sekolah selama proses operasional sekolah. Pelaporan yang dilakukan sekolah secara online dilakukan dengan melibatkan komite sekolah sebagai perantara data yang akan diberikan kepada masyarakat. data hasil pengelolaan tersebut disalurkan komite sekolah kepada para walimuri melalui grup yang memang telah disediakan oleh komite sekolah sebagai wadah informasi terkait pengelolaan sekolah.

Menurut dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas yang terjadi di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya sudah berjalan dengan baik. Pelaporan yang ditunjukkan bukan hanya untuk pemberi anggaran, namun juga disalurkan kepada pihak yang menerima anggaran.

### **Pemanfaatan media sebagai alat informasi dalam pengelolaan dana BOS guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya**

Pemanfaatan media sebagai alat informasi dalam proses pengelolaan dana BOS yang terjadi di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya juga erat kaitannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan sekolah dalam menyalurkan informasi terkait dengan pengelolaan dana BOS. Pendayagunaan teknologi informasi menjanjikan karena dianggap dapat mempercepat penyampaian informasi yang jangkauannya lebih global dan lebih transparan. SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini sebagai media guna menyalurkan data hasil pengelolaan dana BOS kepada pihak-pihak yang dirasa memang perlu untuk mengetahui pengelolaan dana BOS, seperti halnya pemerintah dan masyarakat.

Media yang digunakan oleh sekolah dalam menyampaikan pengelolaan dana BOS ini terbagi menjadi dua cara yakni secara *offline* dan secara *online* yang mana sudah ada subbidang jangkauan dari penggunaan media ini. Untuk pelaporan dana BOS yang dilakukan sekolah kepada pemerintah pusat sebagai pemberi anggaran, sekolah wajib melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah kepada pemerintah secara *online* melalui web resmi pemerintah pusat bagian pendidikan atau dinas pendidikan. Didalam web tersebut sudah jelas terbagi bagian-bagian yang harus diisi oleh sekolah serta juga tertulis penggunaan dana BOS yang harus digunakan sekolah. Dan untuk tata cara secara *offline*, sekolah hanya perlu membukukan data laporan hasil pengelolaan dana BOS tersebut sebagai arsip sekolah dan pertanggungjawaban pada saat pengawasan.

Pelaporan tidak hanya diberikan kepada pemerintah sebagai pemberi anggaran, melainkan kepada masyarakat juga sebagai penerima anggaran. Sama halnya dengan proses pelaporan kepada pemerintah, proses pelaporan data kepada masyarakat juga dilakukan dengan media *online* dan *offline*. Jika melalui media *online*, sekolah menyalurkan informasi mengenai hasil pengelolaan dana BOS melalui komite sekolah yang menjadi jalur penyampaian informasi tersebut. Komite sekolah akan memberikan rincian

hasil pengelolaan dana BOS kepada walimurid sebagai penerima dana BOS, rincian tersebut bukan seluruh dana pengeluaran ataupun pemasukan secara detail melainkan hanya geris besar dari seluruh pengeluaran dan pemasukan sekolah menggunakan dana BOS. Selain itu, penyaluran informasi dengan menggunakan media *Offline* dilakukan sekolah secara rutin dengan menyediakan papan anggaran yang berisi besaran dana yang dikeluarkan dan didapat oleh sekolah. Bukan berupa kode angka, melainkan berupa besaran dana yang memang di pasang sebagai alat penginformasikan bagaimana kondisi sekolah dan bagaimana hasil dari pengelolaan sekolah. Tidak hanya itu, sekolah juga menyiapkan laporan yang juga ikut ditandatangani oleh komite sekolah sebagai bukti keikutsertaannya terhadap pengelolaan keuangan sekolah khususnya dana BOS dan dipasang pada papan pengumuman sekolah. Laporan tersebut juga diganti juga memang ada perubahan yang terjadi, seperti halnya periode penggunaan atau pelaporan yang sudah berganti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan media sebagai alat informasi dalam pengelolaan dana BOS guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya sudah berjalan dengan baik, masyarakat juga menjadi tahu kondisi sekolah dan keadaan operasional sekolah. Sehingga mutu layanan pendidikan yang diberikan sekolah kepada masyarakat juga sesuai dengan dana yang di keluarkan oleh sekolah dan diterima oleh masyarakat.

### **Dampak partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya.**

Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan pendidikan memang menjadi salah satu yang penting. Keterlibatan dalam setiap program dan kegiatan sekolah menjadi alasan sekolah dapat dikategorikan menjadi sekolah terbuka. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya terkait dengan dampak dari adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya menjadi sekolah yang terbuka. Terbuka dalam hal ini yakni, masyarakat



dalam hal ini mampu mengutarakan kebutuhan dan program-program yang dapat menunjang proses pendidikan disekolah. Memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut serta dalam kegiatan dan memberikan akses untuk masyarakat menerima informasi yang berkaitan dengan sekolah akan membuat masyarakat merasa juga memiliki pengelolaan sekolah tersebut.

Partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada sekolah adalah akibat dari keterbukaan sekolah terhadap posisi masyarakat, keterbukaan ini ditunjukkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pada operasional sekolah khususnya pada pengelolaan dana BOS sebagai sumber dana utama sekolah. Proses partisipasi masyarakat yang ditunjukkan memang tidak semenonjol sekolah-sekolah lain namun berarti besar bagi keberlangsungan operasional sekolah. Masyarakat sangat percaya dengan jalannya pendidikan disekolah bagi putra-putri mereka. Masyarakat tahu betul bagaimana sekolah menjalankan pendidikan secara efisien dan efektif bagi peserta didiknya. Keterbukaan sekolah terhadap masyarakat juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sekolah, baik dalam hal donasi, sebagai pengurus acara sekolah, dlln. Dari keterlihatan tersebut, sekolah sebagai pengelola dana BOS dapat mengelola dana sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan baik dan tidak terkekang oleh pembicaraan yang negatif dari masyarakat yang kurang percaya. Pengelolaan menjadi maksimal dan tepat sasaran sehingga kebutuhan peserta didik akan layanan pendidikan yang baik tidak ada yang tidak terpenuhi. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Suzuki (2012) yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasinya, seperti berkontribusi untuk pengembangan sekolah, berkontribusi pada kesejahteraan guru dan ikut dalam kegiatan sekolah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya sudah berjalan dengan baik, masyarakat juga menjadi tahu kondisi sekolah dan keadaan operasional sekolah serta bersama-sama mencari jalan keluar dan saling bergotong-royong jika sekolah menghadapi kendala. Dan untuk sisi sekolah sebagai pengelola, proses

pengelolaan menjadi optimal karena adanya dukungan secara moril dari masyarakat dengan mempercayai sekolah untuk mengelola sebaik mungkin sumber dana yang diterima. Sehingga mutu layanan pendidikan yang diberikan sekolah kepada masyarakat juga sesuai dengan dana yang di keluarkan oleh sekolah dan diterima oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Penerapan transparansi dilakukan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, baik guru, staff kependidikan, maupun komite sekolah. Keterlibatan ini ditunjukkan dengan adanya peran dari komponen tersebut dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS). Dalam keterlibatan guru, staff, dan komite sekolah, sekolah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah baik untuk operasional sekolah maupun untuk keperluan siswa. Komite sekolah sebagai pihak yang mewakili suara masyarakat dan walimurid juga akan mendapat kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan yang dapat secara langsung membantu kemajuan sekolah.
2. Akuntabilitas pada penggunaan dana BOS terlihat dari laporan yang disetorkan sekolah kepada dinas pusat peraturwulan dan laporan tersebut juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah. Pelaporan yang dilaporkan kepada pihak masyarakat melalui komite sekolah yang mana sebagai jembatan antara pihak sekolah dan masyarakat. Pelaporan kepada masyarakat dilakukan sekolah secara offline yakni pada saat adanya pertemuan dengan walimurid. Bentuk akuntabilitas yang di berikan sekolah terhadap masyarakat berupa laporan LPJ.
3. Penginformasian tentang keuangan sekolah dilakukan sekolah melalui papan pengumuman dan papan anggaran yang diletakan di depan sekolah. Media yang digunakan sekolah untuk menunjang transparansi di sekolah kepada masyarakat yakni media hardfile yang di berikan pada saat diadakan rapat oleh sekolah yang juga

turut menghadirkan wali murid. Media hardfile ini mencakup rincian dana yang diperlukan oleh sekolah, dana yang diterima oleh sekolah, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana pemasukan dan pengeluaran dana yang terjadi di sekolah

4. Dampak yang dihasilkan dari adanya Transparansi dan Akuntabilitas dana BOS ini sekolah lebih bisa membuka diri untuk ide-ide yang berasal dari masyarakat. Walimurid dapat mengutarakan ide-ide dan walimurid juga dapat paham bagaimana pengelolaan sekolah khususnya pengelolaan keuangannya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menciptakan jiwa kepedulian masyarakat terhadap semua kegiatan sekolah menjadi meningkat, contohnya dengan masyarakat selalu ingin diikutsertakan dalam semua kegiatan sekolah sebagai bentuk partisipasinya.

#### Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Kepala Sekolah, Kepala Sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan kepala sekolah lebih inovatif dalam melakukan pengawasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan dalam proses pelayanan pendidikan.
2. Dinas Pendidikan diharapkan lebih Kreatif dan Inovatif dalam mengembangkan kembali program-program yang berkaitan dengan Transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan disekolah. Terlebih pada media yang digunakan oleh sekolah dalam menginformasikan data kepada masyarakat.
3. Staff Pendidikan dan Kependidikan, diharapkan lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan ide-ide dan gagasan yang dapat digunakan sebagai landasan program-program sekolah kedepannya
4. Peneliti lain, Penelitian diharapkan dapat menjadikan laporan ini sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat serta dapat meneliti secara lebih dalam lagi terkait dengan Media yang digunakan dalam mengaplikasikan transparansi dana akuntabilitas dana BOS di sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Andrianto, N. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ekowati, S. 2016. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan)". Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hernandez, M. 2008. *Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A Leadership Model*. *Journal of Business Ethics*, (80)1, 121-128.
- Krina, L.L. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Laila, U.N. 2018. "Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP NEGERI 3 Malang". Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Manab, A. 2015. *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. New York: SAGE Publications.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Teori, Model Dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasminten., Roesminingsih, E., & Trihantoyo, S. 2016. "Pemenuhan Standar Kelulusan dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah" *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol.25 (2): hal. 121-128.
- Suzuki, I. 2012. *Parental Participation and Accountability in Primary School in Uganda*. Vol. 32 No. 2 . Online. <http://scihub.tw/10.1080/03057920220143200#> diakses tgl 15 November 2019
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Trihantoyo, S. 2015. "Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*. Vol.3 (1): hal. 90-102.
- Wahidah. 2016. "Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Pengelolaan Dana Bos di Sma Muhammadiyah 5 Makassar". Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan. UIN Alauddin Makassar.